



PUTUSAN
Nomor 2208/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4651/PJ/2018, tanggal 1 November 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

BUT DONGFANG ELECTRIC CORPORATION INDONESIA PROJECTS, beralamat di Alamanda Tower Lantai 26, Jalan TB Simatupang Kav. 23-24, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430, yang diwakili oleh Tuan Wang Ming Zu, jabatan Direktur BUT Dongfang Electric Corporation Indonesia Projects;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zaka Hadisupani Oemang, S.H., dan kawan-kawan kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Azwar Hadisupani Rum & Partners, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-105737.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 6 Agustus 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon agar seluruh koreksi sebagaimana tersebut di atas dapat dibatalkan. Dengan demikian, perhitungan SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 00040/240/10/053/15 tertanggal 28 Januari 2015 Masa Pajak Juli 2010 seharusnya adalah sebagai berikut:

N o.	Uraian	Jumlah Menurut Pemohon Banding (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	40.414.967.512
2	Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang terutang	976.501.676
3	Kredit Pajak:	
	a. PPh Ditanggung Pemerintah	-
	b. Setoran masa	976.501.676
	c. STP (Pokok kurang bayar)	-
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak sebelumnya	
	e. Lain-lain	-
	f. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	-
	g. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e)	976.501.676
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3g)	-
5	Sanksi administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	-
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	-



	e. Jumlah sanksi administrasi	-
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	NIHIL

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding pada tanggal 28 Desember 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-105737.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 6 Agustus 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00578/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 22 April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Juli 2010 Nomor 00040/240/10/053/15 tanggal 28 Januari 2015, atas nama BUT Dongfang Electric Corporation Indonesia Projects, NPWP 02.072.365.6-053.000, beralamat di Alamanda Tower Lantai 26, Jalan TB Simatupang Kav. 23-24, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430, dan menetapkan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Juli 2010 yang terutang menjadi sebagai berikut :

Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	Rp.	40.414.967.512,00
PPh Pasal 4 (2) Final yang terutang	Rp.	976.501.676,00
Kredit Pajak	Rp.	976.501.676,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp.	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 November 2018, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 16 November 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-105737.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018 tanggal 6 Agustus 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-105737.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018 tanggal 6 Agustus 2018 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00578/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 22 April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Juli 2010 Nomor 00040/240/10/053/15 tanggal 28 Januari 2015, atas nama BUT Dongfang Electric Corporation Indonesia Projects, NPWP 02.072.365.6-053.000, beralamat di Alamanda Tower Lantai 26, Jalan TB Simatupang Kav. 23-24, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 2208/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Desember 2018, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00578/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 22 April 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Juli 2010 Nomor 00040/240/10/053/15 tanggal 28 Januari 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.072.365.6-053.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi DPP PPh Final Pasal 4 Ayat (2) dari *Procurement* Sebesar Rp223.808.961.102,00; dan Koreksi DPP PPh Pasal 4 Ayat (2) Dari *Percentage Of Completion* (Selisih Tarif) sebesar Rp63.111.001.668,00 dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa yuridis fiskal yang substansinya telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak terdapat kekeliruan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai fakta dan menerapkan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengambilalih pertimbangan hukum untuk sebagian dari Hakim Anggota Dr. Triyono Martanto, Ak., M.M., M.Hum berbeda pendapat (*Disenting Oponion*) bahwa *in casu* merupakan sengketa yuridis dan substansinya bersifat materiil secara objektif yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum, karena obyek sengketa berupa *Procurement* Sebesar Rp223.808.961.102,00; merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusatnya yang memiliki hubungan efektif dengan kegiatan usaha BUT nya di Indonesia terkait dengan pemberian jasa, pekerjaan, dan kegiatan, dianggap sebagai penghasilan BUT nya di Indonesia (*effectively-connection rule*) karena didukung dengan Izin Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing Nomor IK.01.01.06.EC/KTR/070/2007 tanggal 09 Juli 2007 yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia Departemen Pekerjaan Umum, dimana kegiatan usaha Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali adalah kontraktor, maka *procurement* merupakan salah satu unsur dari pelaksanaan konstruksi yang terintegrasi. Sedangkan penghasilan dari usaha atau kegiatan yang dilakukan Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali (sebagai kontraktor = penyedia jasa konstruksi) merupakan obyek pajak (vide Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PPh). Selanjutnya, dalam hal *Percentage Of Completion* (Selisih Tarif) Sebesar Rp63.111.001.668,00 menurut fakta hukum Termohon Peninjauan Kembali tidak/belum memiliki Sertifikasi (Kualifikasi Usaha) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), sehingga atas penghasilan Wajib Pajak penyedia jasa pelaksana konstruksi dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 4% sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1)

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 2208/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b PP-51/2008. Di samping itu, diperoleh petunjuk bahwa surat pernyataan auditor *a quo* (bukti P-39) terdapat *Statement of Segment Report for Turnover of Main Business 1 Jan 2010 to 31 Dec 2010 Dongfang Electric Corporation (Parent)*, diketahui bahwa nilai pendapatan FOB/Procurement dari Proyek Teluk Naga dan Pacitan Tahun 2010 telah diakui sebagai pendapatan oleh Dongfang Electric Corporation (China) di China dan sertifikat pembayaran Pajak Penghasilan Badan Dongfang Electric Corporation (China) Tahun Pajak 2010 dari instansi perpajakan negara China (bukti P-40) diketahui pendapatan FOB/Procurement dari Proyek Teluk Naga dan Pacitan Tahun 2010 telah diakui sebagai pendapatan oleh Dongfang Electric Corporation (China) di China serta pengakuan penghasilan FOB/procurement Tahun 2009 dalam (bukti P-41) diketahui terdapat penghasilan FOB/procurement sebesar Rp.533.342.300.139,00 yang Invoicennya (bukti P-42) diterbitkan pada Tahun 2009 namun importasinya terjadi pada Tahun 2010. Dan berdasarkan PIB (bukti P-43) diketahui memang terdapat importasi Tahun 2010 sebesar Rp.533.342.300.139,00 yang Invoicennya terbit pada Tahun 2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat keterlibatan Pemohon Banding dalam pelaksanaan pekerjaan Procurement. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan dan berketetapan bahwa koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* telah dilakukan secara terukur dan mencerminkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), karenanya tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf c UU PPh *juncto* Pasal 7 (P3B Indonesia – China) *juncto* Pasal 1 angka 5 dan angka 9, Pasal 3 ayat (1) berikut penjelasannya, Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 2208/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-dalil yang disampaikan merupakan pendapat hukum yang bersifat menentukan, sehingga patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp14.183.533.324,00 dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	R 327.334.930.28
	p 2
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	R 12.453.300.187
	p
Kredit Pajak	R 2.869.831.725
	p
Kompensasi Masa/Tahun Pajak sebelumnya	R -
	p
PPh Kurang Bayar/(Lebih bayar)	R 9.583.468.462
	p
Sanksi Administrasi	R 4.600.064.862
	p
Jumlah PPh yang masih harus dibayar/(lebih bayar)	R 14.183.533.324
	p

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-105737.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 6 Agustus 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 2208/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-105737.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 6 Agustus 2018;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak permohonan Banding dari Pemohon Banding **BUT DONGFANG ELECTRIC CORPORATION INDONESIA PROJECTS** ;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 2208/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>	
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 2208/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 2208/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)